

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 membuat seluruh penduduk dunia berada pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan, bahkan hampir diseluruh negara didunia merasakan dampaknya. Seluruh negara di dunia telah menerapkan bebrapa kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 diantaranya dengan memberlakukan [Lockdown](#), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan yang terakhir ini pemerintah menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun sepertinya belum cukup berhasil, hal ini terlihat dari angka kejadian positif Covid-19 setiap hari masih tinggi. Melihat permasalahan ini perlu dilakukan suatu cara yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi pamdemik Covid-19 yang terus berlanjut. **(WHO, 2021)**

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19). Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan dua surat edaran terkait pencegahan dan penanganan virus tersebut. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. (Goyena & Fallis, 2020)

Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah atau Tim Kesehatan dalam menekan angka kejadian Covid-19 ini, namun pada kenyataannya angka tersebut masih saja meningkat. Melihat

permasalahan ini perlu dilakukan suatu cara atau wadah yang lebih menarik dan gampang digunakan masyarakat untuk melakukan penanganan awal apabila ditemukan tanda dan gejala terinfeksi Covid-19. Salah satu cara yang paling efektif adalah pemberian vaksin bagi setiap warga negara Indonesia. (Covid & Team, 2020)

September 2020 pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk melakukan vaksin pada masyarakat Indonesia. Pemerintah juga telah melakukan survey terhadap sejauh mana masyarakat menerima dan memahami manfaat terhadap pemberian vaksin tersebut. Berdasarkan survey daring yang dilakukan pada tanggal 19-30 September 2020 oleh UNICEF, ditemukan bahwa dari 34 provinsi tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak di provinsi-provinsi di Pulau Papua, Jawa, dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah. Provinsi Papua Barat paling tinggi tingkat penerimaannya (74%) dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya, sedangkan Provinsi Aceh paling rendah (46%). (UNICEF, 2020)

Responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin. Alasan penolakan vaksin Covid-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%). (UNICEF, 2020)

Pada tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Perpres tersebut menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksinasi. Perpres tersebut menetapkan PT. Bio Farma, perusahaan farmasi milik negara, untuk menyediakan vaksin melalui

kerja sama dengan berbagai institusi internasional. Perpres ini juga menetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatur jalannya distribusi vaksin dan program vaksinasi nasional. (Kemenkes RI, 2020)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memastikan vaksin tersedia dengan harga terjangkau. Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap COVAX, Akselerator Akses ke Peralatan Covid-19 (ACT-Accelerator) di bawah kepemimpinan Gavi dan WHO yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan meratanya distribusi vaksin Covid-19 ke semua negara. Pemerintah Indonesia memperkirakan akan menerima 30 juta dosis vaksin pada akhir tahun 2020 melalui perjanjian bilateral dengan berbagai produsen vaksin dan tambahan 50 juta dosis pada awal tahun 2021. (Kemenkes RI, 2020)

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) telah melakukan evaluasi situasi terkait pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan memberikan sejumlah rekomendasi mengenai akses vaksin bagi kelompok-kelompok prioritas. Kemenkes didukung ITAGI dan mitra pembangunan telah menyusun standar operasional prosedur dan peta jalan vaksinasi Covid-19. Instrumen tersebut telah disebarluaskan ke seluruh provinsi dan persiapan penting lainnya termasuk instrumen untuk menilai kesiapan pengenalan vaksin (VIRAT), sedang dilakukan. Semua proses berjalan serentak dan sesuai rekomendasi ITAGI, Kemenkes dengan dukungan dari UNICEF dan WHO, telah melaksanakan survei daring di Indonesia untuk memahami pandangan, persepsi, dan kekhawatiran publik terkait vaksinasi Covid-19.

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya

pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Untuk dapat mengendalikan pandemi Covid-19 di masyarakat secara cepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. (Kemenkes, 2021)

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau "liar". Vaksin akan mempersiapkan sistem imun manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem imun untuk melawan sel-sel (kanker). Edward Jenner menyadari bahwa mereka yang telah terinfeksi oleh cacar sapi (cowpox) sebelumnya, maka tidak akan terkena smallpox (variola vera). Sekarang ini telah terdapat berbagai macam vaksin untuk bermacam-macam penyakit, walaupun demikian vaksin belum ada untuk beberapa penyakit penting, seperti vaksin untuk malaria, HIV. atau demam berdarah dan vaksin untuk virus corona yang sedang melanda dunia.

Pelaksanaan program vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. (Kemenkes, 2021)

Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak

aman 1-2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi Covid-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan. (Kemenkes, 2021)

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Royal Prima terkait pelaksanaan program vaksin Covid-19. Pada pelaksanaan vaksin pertama yang dilakukan oleh Rumah Sakit Royal Prima Medan, dari 100% target yang ditentukan masih tercapai sekitar 60% dan pelaksanaan vaksin kedua menurun sekitar 56%. Peneliti juga bertanya kepada lima orang yang terlibat kedalam tim pelaksana program vaksinasi Covid-19 terkait bagaimana pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di RSU Royal Prima. Tim menjelaskan bahwa pelaksanaan program vaksinasi di RSU Royal Prima sudah berjalan 3 tahapan yaitu vaksinasi 1, vaksinasi ke 2 dan saat ini masih berlangsung untuk pemberian vaksinasi yang ke-3. Setiap tahapan pelaksanaan program vaksinasi ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh tim manajemen rumah sakit.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “evaluasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan metode *non performing loan (NPL)* di Rumah Sakit Royal Prima Medan 2021”.